

Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Aparatur Secara Elektronik Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo

Electronic Apparatus Performance Information System Policy In The Employment Agency Wajo District Region

Indo Sennang^{1*}, Imran Ismail², Juharni²

¹Magister Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

*E-mail: indosennang45@gmail.com

Diterima: 27 Februari 2023/Disetujui 30 Juni 2023

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi, dan sarana komunikasi interaktif antara pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dengan menggunakan teknik Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hampir seluruh jenis aplikasi yang digunakan pasti melibatkan pengolahan data menjadi informasi yang selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah maupun perangkat terkait dalam proses pengambilan keputusan. Di lingkungan pemerintahan, hampir setiap hari para birokrat pemerintahan harus mengambil keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan/keberadaan pemerintahan yang bersangkutan.

Kata Kunci: Kebijakan, Kinerja, Aparatur, Wajo

Abstract. The purpose of this study was to determine the implementation of information and communication technology-based public services, as information media, and interactive means of communication between the government and other parties, both community groups, business circles and between fellow government agencies. This study uses a qualitative research type with research locations in the Wajo District Civil Service Agency. This research was conducted for 2 months, using interview, observation and documentation techniques. The results of the study show that almost all types of applications used involve data processing into information which will then be used by the government and related agencies in the decision-making process. In the government environment, almost every day government bureaucrats have to make important decisions related to the welfare of the people and the continuity/existence of the government concerned.

Keyword: Policies, Performance, Apparatus, Wajo



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang melaju sedemikian pesat, khususnya selama beberapa tahun terakhir ini, telah mengantarkan peradaban umat manusia masuk ke dalam era informasi, di mana teknologi informasi menjadi bagian yang sulit dipisahkan dalam kehidupan. Era baru ini semakin terasa di Indonesia dengan semakin meningkatnya peranan teknologi informasi dalam berbagai bidang kehidupan khususnya di bidang pemerintahan.

Pemerintah dalam hal ini melakukan pengambilan keputusan (decision making) tertentu untuk pengembangan solusi yang baru maupun perubahannya akan sangat membutuhkan peranan sistem informasi yang didukung oleh teknologi informasi yang tepat guna mensiasati wabah Virus Covid-19 agar tidak mempengaruhi kinerja pemerintah, salah satu model yang harus ditingkatkan untuk menghadapi hal tersebut adalah efektivitas pemanfaatan teknologi informasi. Sejalan dengan diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota dituntut untuk mandiri, yang salah satunya adalah kemandirian dalam pengelolaan kepegawaian secara profesional sehingga mampu meningkatkan kinerja dan efektivitas kerja aparatur di semua level.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagai media informasi, dan sarana komunikasi interaktif antara pemerintah dengan pihak-pihak lain baik kelompok masyarakat, kalangan bisnis maupun antar sesama lembaga pemerintahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: data primer, data sekunder, data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

1. Proses Implementasi Kebijakan Sistem Infornmasi secara Elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo

Penerapan sistem informasi aparatur secara elektronik yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo akan berhasil apabila ada aturan dan pedoman dalam menjalankannya, karena memang sebaik apapun sebuah kebijakan tapi tidak di dukung oleh kejelasan sasaran dan tujuan dari kebijakan tersebut maka akan sulit kebijakan yang dibuat terimplemtasi dengan baik di lapangan. Dalam pelaksanaan implentasi sistem informasi secara elektronik maka usaha dalam meningkatkan kinerja pegawai terutama pada masa pandemi Covid-19 Kemarin kehadiran sistem informasi secara elektronik sungguh sangat membantu para pimpinan dalam melakukan penilaian kinerja terhadap stafnya. Namun ada beberapa masalah yang dihadapi oleh bidang pelaksana sistem Informasi secara Elektronik dilapangan yaitu Bidang Pendayagunaan dan pembinaan Badan Kepegawaian Dearah Kabupaten Wajo terkait dengan masalah koordinasi yang lemah antar struktur birokrasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Guna menyelesaikan masalah tersebut Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan Badan Kepegawian Daerah Kabupaten Wajo membuat sebuah prosedur tetap atau standar operasional prosedure (SOP) untuk kelancaran implementasi kebijakan sistem informasi aparatur secara elektronik yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Kabupaten Wajo.

Adanya standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan merupakan faktor pendukung dalam berjalannya implementasi kebijakan sistem informasi aparatur secara elektronik di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo. Untuk SOP yang digunakan oleh bidang Pendahyagunaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo dalam implementasi Kebijakan sistem Informasi Aparatur secara Elektronik tidak dirancang sendiri melainkan bidang pendayagunaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten wajo merangangnya bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wajo.

2. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Apartur secara Elektornik pada Badan Kepegawaian Dearah

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (Good Government) adalah cita-cita bangsa Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan good governance adalah dengan berupaya melakukan reformasi di segala kegiatan pemerintahan salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi (E-government).

Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dengan menggunakan sistem informasi kinerja apartur secara elektronik juga di barengi dengan peningkatan atau perubahan pemberian tunjangan kinerja. Dengan terbitnya Peraturan pemerintah tentang besaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo pada tahun. Tambahan penghasilan pegawai diberikan berdasarkan kelas jabatan dan penilain prestasi kerja pegawai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

3. Implementasi Kebijakan sistem informasi secara Elektronik di ukur Melalui Standar Kebijaksanaan dan Tujuan

Implemtasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakam. Artinya Implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan serta dampak kebijakam dapat dihasilkan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus di implementasikan kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik, serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Sistem informasi kinrja Aparatur secara elektronik yang dilaksanakan pada Badan Kepergawaian Daerah Kabupaten Wajo yang mana penanggungjawab kegiatannya dilaksanakan pada Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan merupakan sebuah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Sulawesi Selatan dalam bentuk aplikasi yang dibuat khusus untuk menilai kinerja pegawai secara langsung dengan memasukkan uraian tugas jabatan pegawai kedalam aplikasi pelaksanaan sasaran kinerja.

Dengan pelaksanaan penilian kinerja melalui sistem informasi kinerja apartur secara elektronik ini diharapkan akan mampu memberikan kemudahan bagi para pemimpin dalam melakukan penilaian kinerja pegawai, sistem ini diharapkan dapat memberikan bagi pemimpin dalam memberikan peningkatan efektifitas dan efesiensi dalam penilaian dan dengan sistem penilaian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur dan akan membawa perbaikan kinerja pelayanan instansi Pemerintah yang professional secara keseluruhan. Pentingnya peningkatan kualitas penilaian kinerja pegawai melalui sistem infomasi kinerja apartur secara elektronik yang merupakan salah satu prioritas dalam tahpan pengembangan kualitas PNS.

4. Implemntasi Kebijakan Sistem Informasi Aparatur secara elektronik Diukur Melalui Sumber Daya Organiasi pelaksana

Selain adanya standar kebijaksanaan dan tujuan, hal penting lainnya dalam suatu implemntasi program pemerintah di tengah-tengah masyarakat adalah ketersediaan sumber daya yang memadai tentu akan membantu kelancaran dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam hal ini, bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh Bidang Pendayagunaan dan Pembinaan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo dapat meningkatkan implementasi kebijakan sistem informasi kinerja aparatur secara elektronik yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo.

Meskipun bagaimana jelasnya proses standar kebijakan dan tujuan dari implementasi kebijakan sistem informasi kinerja aparatur secara elektronik yang di laksanakan pada Badan Kepegawaian Dearah Kabupaten Wajo dan besarnya kewenangan yang sudah di berikan.

5. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi secara Elektronik di ukur Melalui Komunikasi Antar Organisasi dan Aktifitas Pelaksana

Proses komunikasi efektif antar organisasi dan aktifitas pelaksana diperlukan dalam kerangka pelaksana implementasi kebijakan sistem informasi kinerja aparatur secara elektronik yang dilaksanakan pada badan kepegawaian daerah Kabupaten Wajo. Pimpinan dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo harus mengkomunikasikan kebijakan yang akan dilaksanakan kepada bidang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan sistem informasi kinerja aparatur secara elektronik agar dapat memahami maksud dan tujuan dari implementasi kebijakan sistem penilain pegawai secara elektronik. Komunikasi adalah perekat organisasi dan koordinasi adalah asal mula dari kerja tim serta terbentuknya sinergi dan integritas. Komunikasi adalah komponen harus dilakukan secara intensif agar kinerja dalam pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa iplementasi kebijakan sistem informasi secara elektronik yang dilaksanakan pada Badan kepegawaian Daerah Kabupeten Wajo dikatakan berhasil apabila ada aturan dan pedoman dalam menjalankannya, karena memang sebaik apapun sebuah kebijakan tapi tidak didukung oleh kejelasan sasaran dan tujuan dari kebijakan tersebut maka akan sulit kebijakan yang dibuat terimpelemtasikan dnegan baik di lapangan. Oleh karena itu Badan Pembinaan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo membuat sebuah prosedur tetap aatau standar (SOP) untuk kelancaran implelentasi kebijakan sistem informasi aparatur secara elektronik yang dialksanakan Badan Kepegawaian Kabupaten Wajo

Implementasi kebijakan sistem informasi kinerja aparatur secara elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo terdapat beberapa indicator yang harus di perhatikan yaitu adanya standar kebijakan dan tujuan, sumber daya organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi, sikap para pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Apabila Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wajo tidak dapat memenuhi 5 (lima) indikator tersebut maka akan timbul hambatan-hambatan yang dapat memicu terjadinya kegagalan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Kinerja Aparatur secara Elektronik. Untuk itu terkait implementasi kebijakan sistem kinerja aparatur secara elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah Kbaupaten Wajo secara keseluruhan belum berjalan secara optimal, efektif, dan efisien dikarenakan masih banyak yang belum mengetahui cara penggunaan apalikasi elektronik yang berbasis elektronik tersebut.

Daftar Pustaka

- Agus Salim. Perubahan Sosial. 2018. Sketsa Teori Dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 2019. Dasar-Dasar Ilmu Administrasi. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dunn, William N.2018, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadja Mada University Press
- Gibson, Jamess L. Ivancevich John, M dan Domelly James J. 2018. Organisasi dan Manajemen Perilaku, Struktur, Proses, Alih bahasa Djoerbanwahid, Jakarta: Erlangga
- Gie. The Liang. 2018. Pengertian Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi, Yogyakarta: Karya kencana
- Handayuningrat, Soewarno. 2018. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung
- Handoko. T Hani, 2018, Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia, BPFE, Yogyakarta.
- Hariandja, Marihot T.E, 2020. Manajemen Sumberdaya Manusia. Jakarta: Grasindo
- Hartani A.L, 2018, Manajemen Pendidikan, Yogyakarta: LaksBan Pressindo. Islamy, M. Irfan. 2013. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta. CV. Sinar Grafika
- Hasibuan, Malayu. 2019. Manajemen Sumber Daya Manusia: edisi revisi cetakan ketujuh. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasyim, Imran Ismail, Uddin B. Sore, 2022. Pengembangan Sumber Daya Manusia.CV Berkah Utami
- Kasmir. 2018. Manajemen Sumberdaya Manusia (Teori dan Praktik). Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mahmudi, 2019, Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen
- Mangkunegara, A. Prabu, 2018. Manajemen Sumberdaya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Manullang, 2016, Dasar-Dasar Manajemen, edisi revisi, cetakan ketujuh, Penerbit : Ghalia Indonesia, Jakarta
- Moekijat, 2018. Manajemen Sumberdaya Manusia, CV. Mandar Maju, Bandung Moleong, Lexy J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nawawi, H. Hadri. 2018, Kepemimpinan Mengefektifkan Organisasi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

- Nitisemito, Alex S. 2018. Manajemen personalia Manajemen Sumberdaya Manusia. Edisi Ketiga. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pace, R. Wayne dan Don F. Faules. 2018. Komunikasi organisasi (terjemahan). Bandung: Rosdakarya
- Saparuddin, I, Juharni, Nurkaidah. 2022. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan.CV.Berkah Utami
- Sofyan Wijaya, Syamsuddin Maldun, Uddin B. Sore. 2022. Pengembangan Sumber Daya Manusia: CV Berkah Utama
- Tangkilisan, 2018. Manajemen Publik, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Thoha, Miftah MPA. 2018. Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Umar, Hussein.,2018. Evaluasi Kinerja Perusahaan. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nurhayati, Syamsuddin Maldun, Nurkaidah, 2022. Implementasi Sistem Online single submission (OSS).CV.Berkah Utami
- Prawirosentono, Suyadi. 2019. Kebijakan Kinerja Karyawan. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangann e-Government.